



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

*Sertifikat*

NOMOR : B-1411 /UN40.LP/DL/2021

Diberikan kepada :

**Dr. Hasanuddin, M.Si.**

Atas partisipasinya sebagai Narasumber dalam acara

*International Webinar* : “Strategi Kolaborasi Pengembangan Jejaring Industri  
Ekowisata Berbasis Budaya dan Pendidikan Seni”

Yang dilaksanakan pada tanggal, 7 Oktober 2021.

Bandung, 7 Oktober 2021.

Ketua LPPM UPI,



Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.  
NIP 196310241988031003

NO	MATERIAL	LESSON HOURS	KEYNOTE SPEAKER/SPEAKER
1.	Strengthening the Creative Economy, Entrepreneurship, and Tourism Industry in the Era of the Pandemic in Uzbekistan	1	Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. "Indonesian Ambassador of Uzbekistan and Kirgizstan"
2.	Cultural Variety of the Archipelago in Anthropological Studies of Art Education	1	Dr. Yuliawan Kasmahidayat, M.Si. "Lecturer in Dance Education Program, FPSD UPI & Head of EKKIP LPPM UPI"
3.	Synergy of Ecotourism Industry Development Based on Indonesian Cultural Pluralism	1	Dr. Hasanuddin, M.Si. "Lecturer in Cultural Studies Program, FIB, Andalas University"
4.	Blue Tourism : Asimilating Blue Economy Concept with Sustainable Marine and Coastal Ecotourism Development	1	Assoc. Prof. Dr. Mohd Hafiz Mohd Hanafiah "Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Jaringan Industri) Universiti Teknologi of MARA"
Jumlah		4	

# SINERGITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI EKOWISATA BERBASIS PLURALITAS BUDAYA INDONESIA

Oleh Hasanuddin

## Abstrak

Manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan mengemban amanah sebagai *khalifatu fi al ardh*. Akan tetapi, pengembangan ekowisata seringkali berorientasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya non manusia (*back to nature*) tapi melupakan perhatian pada peran manusia dan masyarakat setempat dalam memberdayakan kearifan local yang dimilikinya untuk pelestarian lingkungan. Dalam konsep ekowisata berbasis masyarakat, yang dicanangkan Depbudpar dan WWF Indonesia 2009, kesadaran keberpihakan tersebut telah ada, tetapi kesadaran tersebut mesti dikonstruksikan sebagai superstruktur ideologis pengembangan ekowisata nasional dan dari situ diturunkan struktur dan dikembangkan infrastruktur materialnya. Jika tidak, yang akan terjadi adalah pengembangan kepariwisataan yang muaranya tetap *mass tourism* walaupun ada embel-embel ekowisatanya. Paper ini merupakan deskripsi empiris terbatas dan preskripsi ideologis pengembangan ekowisata di Indonesia sebagai proses kulturalisasi menuju penguatan basis multikulturalisme Indonesia.

## PENDAHULUAN

Kepariwisata modern adalah “anak kandung”nya globalisasi, walaupun sejarah perjalanan manusia telah dimulai sejak manusia itu belum mengenal tulis baca dengan motivasi awal memenuhi tuntutan rasa haus dan lapar, rasa ingin tahu, ketakutan, menghindari bencana, atau untuk memenuhi kegilaan akan kekuasaan dan kehormatan. Beberapa indicator awal kepariwisataan yang dapat dicatat adalah perjalanan perdagangan bangsa Sumeria di Babilonia dan uang sebagai alat tukar pada kira-kira 4.000 BC; jalan raya di Tiongkok (221-122 BC); di Timur Tengah (Persia 560- 330 BC); dan di Romawi (bangsa yang memelopori *travel for pleasure*). Objek-objek yang dikunjungi adalah seperti candi-candi dan pyramid peninggalan Mesir Kuno, Olympiade di Yunani, Ephesus (daerah Turki sekarang/ daerah demokrasi pertama yang dikembangkan oleh Alexander The Great (Iskandar Zulkarnaen) pada tahun 334 BC). Objek yang dicari lainnya adalah sumber air panas, seni budaya tradisional, olah raga, berburu, dansa, perjudian, dan kota-kota pantai. Perlu dicatat, gangguan keamanan dan kenyamanan perjalanan adalah sumber bencana bagi dunia perjalanan [1]. Globalisasi menjadi fasilitator

utama bagi berkembangnya kepariwisataan modern pasca PD II, sebab telah menjadi penembus batas-batas Negara bangsa, dimana peran Negara-bangsa makin direduksi dalam mengelola ekonomi dan politik nasional. Teknologi transportasi dan informasi serta keamanan yang relative lebih terjamin telah menjadi pendorong bagi berkembangnya kepariwisataan global [2].

Persoalannya, apakah globalisasi akan menjadikan dunia global menjadi seragam atau melanggengkan keberagaman? Petaan M. Cholild Syeirazi (2003) menarik untuk ditampilkan disini. Interkonektifitas akibat globalisasi cultural dikuatirkan menabrak nilai-nilai local dan identitas parochial. Kecurigaan atas imperialism kebudayaan Amerika, yang disebut sebagai proyek California-ization of taste oleh Ohmae (1996) atau McDobalidisasi (Ritzer, 1993) diasumsikan akan menggiring kepada kehancuran kehidupan keberagaman budaya. Akan tetapi, masih banyak sarjana yang optimis bahwa globalisasi akan memunculkan kantong-kantong kebudayaan local baru, yang mereka sebut sebagai glokalisasi, yang dicirikan oleh saling pinjam kebudayaan, dorongan dinamis ke arah homogenisasi dan heterogenisasi, sehingga melahirkan budaya hybrid atau kreol dalam berbagai ekspresi simbolik [3].

Begitu eratnya kepariwisataan dan pengembangannya dengan globalisasi, dan kenyataan bahwa huru-hara dan pandemic menjadi factor pengancam terhadap pariwisata, paper ini berpijak pada perspektif bahwa kepariwisataan khususnya ekowisata mesti dikembangkan berbasis budaya, bertolak dari esensi manusia sebagai *khalifatu fil al ardh* dan fitrah manusia yang plural dan multikultural. Semangat yang hendak dibangun adalah optimism persiapan menghadapi kegairahan pariwisata di masa normal baru pasca pandemi covid-19 pada tahun-tahun mendatang. Untuk itu, sinergi kollaboratif pengembangan ekowisata berbasis pluralitas budaya Indonesia dan Serumpun perlu segera digerakkan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Ekowisata dan Kearifan Lokal**

Pemetaan ekowisata dan problematika pengembangannya di Indonesia disajikan sebagai dasar berpijak untuk mendiskusikan perlunya pengembangan ekowisata sejalan dengan penguatan kembali pluralisme udaya dan multikulturalisme Indonesia.

Bali dapat dikatakan pusat kepariwisataan Indonesia. Pembangunan Ekowisata Bali berbasis sumber daya alam dan budaya, khususnya pada masyarakat Bali Aga, Desa Pedawa dan

Cempaga (Kabupaten Buleleng), seperti juga di Desa Tenganan (Kabupaten Karangasem), Trunyan dan Sukawana (Kabupaten Bangli). Orientasi pengembangan adalah memperoleh manfaat ekonomi, menciptakan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial budaya setempat [4]

Di Jambi, salah satu destinasi ekowisata yang dikembangkan berbasis kekayaan flora dan fauna dan kearifan lokal masyarakat terhadap pelestarian lingkungan adalah kawasan Hutan Lindung pada kawasan Bujang Raba. Potensi ekowisata yang ada di antaranya adalah Lubuk Larangan, Sungai Batang Buat, Air Terjun, Agroforest atau kebun campur dan Hutan Desa. Kebijakan yang diterapkan adalah menjadikan kearifan lokal masyarakat terhadap pelestarian lingkungan sebagai ikon dalam mempertahankan tutupan bentang alam hutan lindung melalui Hutan Desa, terbukanya peluang investasi dan peningkatan PAD, Ancaman, yaitu tingginya alih fungsi lahan, terjadinya perubahan kebijakan politik, ekonomi dan budaya cukup tinggi [5]

Di Lampung Selatan, pengembangan masyarakat berbasis ekowisata mengedepankan keberlanjutan ekosistem atau lingkungan, berlandaskan pada perspektif harmonisasi manusia dan alam, tidak orientasi ekonomi semata. Konsep telah diimplementasikan di Desa Waymuli Induk, meliputi: (a) Perencanaan Sosial/ sosialisasi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan secara musyawarah, (b) Pengembangan/ pemberian stimulasi kemandirian masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi melalui pelatihan-pelatihan tertentu, dan (3) Aksi Sosial peningkatan kualitas objek dan penguatan Kelompok Ekonomi masyarakat. Alam bisa dimanfaatkan secara optimal potensinya, kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat jika keduanya diorganisir dengan baik [6].

Sementara itu, di Kabupaten Malang, Jawa Timur terdapat ekowisata Pulau Sempu yakni pulau kecil (877 Ha) menghadap Samudra Hindia. Pulau itu adalah kawasan cagar alam dengan panorama serta flora dan fauna yang eksotik. Pulau itu memiliki ekosistem: hutan Mangrove, hutan pantai, danau air tawar Telaga Lele ( $\pm 2$  Ha) dan danau asin Segoro Anakan ( $\pm 4$  Ha), Hutan Tropis Dataran Rendah. Pulau Sempu memiliki flora berupa  $\pm 223$  jenis tumbuhan yang tergolong dalam 144 marga dan 60 suku dan fauna  $\pm 51$  jenis yang terdiri dari 36 jenis Aves, 12 jenis mamalia dan 3 jenis reptil. Yang paling sering di jumpai diantaranya Babi hutan (*Sus scopa*), Kera hitam (*Presbytis cristata*), Belibis (*Dendrosyqna* sp) dan burung Rangkong (*Buceros undulatus*). Dias Satria (2009) melihat potensi besar, menyarankan pengembangan yang selaras dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, tidak berbenturan dengan program

konservasi, melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah secara optimal untuk menikmati keuntungan secara ekonomi, peningkatan kerjasama dengan agen perjalanan dan unit aktivitas mahasiswa pecinta alam [7].

Di Kabupaten Jember, Ahmad Fadli menawarkan peralihan konsep pengembangan pariwisata dari konvensional menuju Ekowisata, yakni wisata atau eksploitasi alam yang bertanggung jawab sesuai kultur masyarakat setempat. Ekowisata merombak konsep wisata konvensional yang eksploitatif dan tidak ramah lingkungan, mengedepankan unsur kepedulian, tanggung jawab, komitmen terhadap keaslian budaya dan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian dan harmoni sosial budaya destinasi wisata tersebut. Pengembangan ekowisata melibatkan stake-holder, khususnya masyarakat sekitar area wisata sejak tahap perencanaan. Orientasi hasil pada peningkatan PAD yang tidak eksploitatif dan merusak lingkungan serta menjadikan masyarakat tercerabut dari budaya lokal mereka atau mengisolir dan memperbudak mereka di lingkungannya sendiri oleh kekuatan capital [8].

Implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata Bromo berbasis kearifan lokal di Ngadas hingga saat ini masih belum efektif. Pertama, perumusannya kurang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom), sehingga kurang selaras, sinergis dan akseptabel dengan kebutuhan masyarakat Ngadas dan kepentingan para pihak (stakeholders). Kedua, implementasi kebijakan oleh pengelola ekowisata (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) kurang sinergis dengan kebutuhan masyarakat Ngadas dan kepentingan para pihak (stakeholders). Ketiga, pengelola ekowisata Bromo (TNBTS) untuk melibatkan para pihak (stakeholders) dalam implementasi kebijakan sehingga interaksi kurang harmonis, sering terjadi konflik dengan masyarakat Ngadas sehingga implementasi kebijakan tidak efektif. Walaupun demikian, potensi efektifitas implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata Bromo di Ngadas masih terbuka untuk diperbaiki. Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek isi kebijakan (*content of policy*) dan aspek lingkungan implementasi (*context of implementation*) (Grindle, 1980). Dalam isi kebijakan (*content of policy*) meliputi: kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambil keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan. Konteks implementasi (*context of implementation*) meliputi: kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang dilibatkan; karakteristik lembaga dan penguasa; dan kepatuhan dan daya tanggap.[9]

## **Kebijakan Pengembangan Ekowisata**

Pembangunan ekowisata diatur dengan lima undang-undang, yakni: UU 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; UU 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya; UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari kelima undang-undang itu diturunkan cukup banyak peraturan, meliputi empat lembaga kementerian yang terkait, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri. Turunan peraturan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurunkan empat peraturan pemerintah, Sembilan peraturan menteri, dan 13 peraturan Dirjen.
2. Kementerian Pariwisata menurunkan dua peraturan pemerintah, dua peraturan presiden, satu Keputusan Presiden, dan lima Peraturan Menteri.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan menurunkan dua undang-undang, tiga peraturan pemerintah, 14 peraturan menteri, dan satu keputusan dirjen.
4. Kementerian Dalam Negeri menurunkan dua undang-undang, satu peraturan menteri dalam negeri, dan satu Keputusan bersama Kemenpar, Kemenpenbud dan Kemndagri.

Analisis R. Hendrik Nasution, Ricky Avenzora, dan Tutut Sunarminto terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut. [10]

1. Postur Rantai Kebijakan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Ekowisata diidentifikasi memiliki beberapa amanat yang kurang tegas, dan beberapa amanat belum ditindaklanjuti dengan peraturan lebih rendah,
2. Substansi Materi Perundang\_Undangan Ditinjau dari Landasan Yudiris dalam Kaitannya dengan Tujuan Ekowisata masih terdapat disharmoni di antara berbagai regulasi dan kebijakan tentang kepariwisataan, meliputi tujuan; kewenangan pengelolaan; tidak kompeherensif dan terstruktur
3. Rentang Waktu Penetapan Rantai Aturan dan Kebijakan Ekowisata ditemukan adanya peraturan pelaksana yang belum dikeluarkan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, yakni 2 tahun.

4. Persepsi Stakeholders atas Dinamika Kebijakan dan Perundang-undangan Pembangunan Ekowisata di Indonesia, diberi catatan sebagai berikut.
  - a. Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat kinerja institusi, integralitas regulasi, kesadaran dan konsistensi pemerintah dalam mengoptimalkan berbagai manfaat hutan, masih rendah.
  - b. Pada kementerian pariwisata, regulasi dan kebijakan belum komprehensif, masih parsial, disebabkan basis keilmuan staf kementerian tidak sesuai ekowisata; egosentrisme ahli non tourism study, *miss understanding* konsep ekowisata yang selama ini hanya dipandang sebagai bentuk perjalanan wisata ke alam dan/atau *back to nature*;
  - c. Kementerian Kelautan dan Perikanan masih memiliki motivasi dan political will yang rendah dalam menyusun regulasi ekowisata yang komprehensif; substansi esensial regulasi tentang kepariwisataan\_ekowisata laut masih tumpang tindih dengan materi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, akibatnya akan terjadi tarik menarik kepentingan pengembangan ekowisata laut atau bahari. Untuk itu perlu dilakukan *integrated based management* dalam menyusun regulasi ekowisata di Indonesia
  - d. Kemendagri memiliki ambiguitas konsep dan makna dalam penyusunan regulasi; memiliki orientasi *political approach* dalam kebijakan; rendahnya obyektifitas dalam tatanan regulasi pembangunan ekowisata di wilayah perairan yang belum adil dan banyaknya intervensi institusi bisnis.

### **Pluralitas budaya Indonesia**

Indonesia sebagai bangsa dan Negara dibangun di atas realitas kebinekaan (Gonggong, 2002, Ardika, 2004; Hasanuddin, 2018). BPS mencatat ada 633 suku bangsa di Indonesia (BPS, 2021; dibandingkan dengan Alisyahbana, 1988; Koentjaraningrat, 1993; dan Geertz, 1981)[11]. Namun, dibutuhkan waktu hanya 37 tahun untuk membuahakan proklamasi kemerdekaan dari kekuasaan kolonialis sejak kesadaran nasionalisme ditumbuhkan (1908-1945) [12]. Oleh sebab itu, Negara berkomitmen bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (UUD 1945 Pasal 18B (ayat 2) [13].

Di samping itu, sebagai implementasi atas komitmen nasional dibuat Kebijakan nasional dalam bentuk produk hukum yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Telah ada empat undang-undang tentang hal itu, yakni UU 22/1999, UU 32/2004, UU 23/2014 dan UU 2/2015. Otonomi Daerah adalah “kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU 22/1999, pasal 1 huruf h). Hal itu kemudian diperluas menjadi “hak, wewenang dan kewajiban” (UU 32/2004, pasal 1 angka 5). Maknanya adalah bahwa “mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat” bukan hanya kewenangan tetapi juga hak dan kewajiban pemerintah daerah otonom. Namun, hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah otonom hanya sebatas “urusan pemerintahan” yang diberikan. Pemberian kewenangan oleh pemerintah (pusat) kepada pemerintah daerah otonom dibatasi dengan ketentuan: “... harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia”, “... kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah”, “... sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum” dan “Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah juga memperhatikan kepentingan nasional”. Selain itu, sesungguhnya kewenangan otonomi daerah hanyalah selain yang menjadi ranah kewenangan pemerintah pusat, yakni: selain politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi/ peradilan, moneter dan fiscal nasional, dan agama (Pasal 7 (1) UU 22/2009, Pasal 10 (3) UU 32/2004, Pasal 19 (1) UU 23/2014) [14].

### **SIMPULAN (Keniscayaan Kollaborasi dan Sinergi)**

Berdasarkan uraian di atas, pengembangan ekowisata di Indonesia masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) secara komprehensif. Sejalan dengan *des sein* (keadaan apa adanya) Indonesia yang multicultural, sesuai fitratullah bahwa manusia diciptakan dalam fitrah keberagaman, maka desain kollaborasi sinergis itu mestilah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh esensi multikulturalitas Indonesia itu. Yang Kami maksud dengan esensi multikulturalitas tersebut adalah bahwa Negara wajib menjaga keutuhan territorial dan cultural Republik Indonesia. Oleh sebab itu, sesuai dengan Komitmen Nasional bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya, mestilah menjadi superstruktur

ideologis yang terimplementasi pada semua unsur dan level kebijakan, termasuk pada kebijakan ekowisata.

Setiap kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kearifan local-kearifan local, yang merepresentasikan sekaligus merefleksikan eksistensi manusianya yang diamanahi sebagai *khalifatu fil al ardh*. Representasi fitrah dan amanah di atas memiliki implikasi pada keberagaman budaya dan kekhasan pengelolaan alam lingkungan berdasarkan kearifan local setempat. Keberpihakan kepada kearifan local. Konstruksi superstruktur ideologis yang kami maksudkan mengorientasikan pengembangan ekowisata di Indonesia sejalan dengan konsep dasar pembangunan keindonesiaan yang berlandaskan filosofi Bineka Tunggal Ika. Dengan kata lain, Negara memberikan jaminan bagi pengembangan ekowisata berbasis kearifan local masyarakat setempat, yang secara nasional-akumulatif akan sangat beragam, tetapi tetap dalam satu nafas dan kerangka: yakni Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan sinergitas kollaboratif, tidak hanya pada tataran tripartite (pemerintah, pengusaha, masyarakat) atau pentahelix (Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media), tetapi benar-benar komprehensif dan holistic. Dengan kata lain, pembangunan ekowisata mesti dilakukan secara utuh terintegrasi dengan pembangunan kebudayaan dan seluruh bidang atau sector yang ada.

Untuk itu, kami menyarankan (1) perlunya kembali adanya Haluan Negara sebagai dasar filosofis, operasional, dan implementasi pembangunan yang sejalan dengan motto kebangsaan bhineka tunggal ika, dan (2) pembangunan ekowisata khususnya dan pembangunan umumnya, didasari dengan riset multi/ inter/ trans disipliner, dan (3) diorientasikan kepada penguatan kapasitas manusia sebagai *khalifatu fi al ardh* dan hasilnya memperkuat eksistensi multikulturalitas budaya dalam tatanan yang harmoni, yakni keindahan mosaic multikulturalisme Indonesia. Sinergi diarahkan oleh Haluan Negara, ditindaklanjuti dengan kollaborasi akademik, pemerintaham pelaku usaha, masyarakat, dan media.

## REFERENSI

- [1] Oka A. Yoeti. 1985. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa; Samsuridjal D dan Kaelany HD. 1997. Peluang di Bidang Pariwisata. Tt. Mutiara Sumber Widya; James J. Spillane. 1985. Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya. Yogyakarta: Kanisius.
- [2] Kenichi Ohmae, 1990, *The Boreless World: Power and Stratgy in the Interlink Economy* (London: Harper Businessm); Kenichi Ohmae, 1996, *The End of The Nation-State; The Rise of Regional Economies* (Hammersmith) London: HarperCollins Publisher).

- [3] M. Kholid Syeirazi, 2003, Dilema Praktik Globalisme Neoliberal, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7(1): 1-34; Kenichi Ohmae, 1996. Op.cit; George Ritzer, 1993, *The McDonaldization of Society* (Thousans Oaks, CA: Pine Forge Press).
- [4] Putu Agus Haribawa, Ricky Avenzora, dan Harnios Arief. “Analisis Orientasi Stakeholder Untuk Pembangunan Ekowisata Di Wilayah Bali Aga, Buleleng-Bali (Analysis of Stakeholder Orientation for Ecotourism Development in Bali Aga Region, Buleleng-Bali)” *Media Konservasi*. Vol. 22, No. 3, pp 269-276, Des 2017.
- [5] Eko Setianto, Hutwan Syarifuddin, Doni Iskandar, “Analisis Potensi Ekowisata Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan Pada Kawasan HI Bukit Panjang Rantau Bayur (Studi : Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo)” *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*. Vol. 2. no (1) 2019 DOI: <https://doi.org/10.22437/jpb.v21i1.5101>
- [6] Aam Amaliyah, 2017, Model Pengembangan Masyarakat Berbasis Ekowisata Di Desa Waymuli Induk Rajabasa Lampung Selatan Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- [7] Dias Satria. Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 3 No. 1 Mei 2009, 37-47
- [8] Ahmad Fadli, Reinventing Government Ekowisata Kabupaten Jember *FENOMENA*, Vol. 15No. 2, pp. 297-313 Oktober 2016
- [9] Setyo Utomo. 2018. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Tengger, Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang (Disertasi): 273; Program Studi Doktor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember; Grindle, Merilee S. (ed) 1980. *Politics and Apolisy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press.
- [10] R. Hendrik Nasution, Ricky Avenzora, dan Tutut Sunarminto, Analisis Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Ekowisata Di Indonesia (The Analysis of Ecotourism Laws and Policies in Indonesia), *Media Konservasi* Vol. 23 No. 1 April 2018: 9-17
- [11] Hilderd Geertz menyebut ada lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia (Geertz, Hildred. 1981. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia* [The Various Cultures and Communities in Indonesia]. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan FIS – UI; Alisyahbana memperkirakan 400-500 suku bangsa (Alisyahbana, Sutan Takdir. (1988). *Kebudayaan Sebagai Perjuangan*. Jakarta: PT Dian Rakyat. <http://beritaunsoed.com/2018/07/10/sutan-takdir-alisjahbana/>). Koentjaraningrat, justru hanya 195 suku bangsa (Koentjaraningrat. (1993), *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press). Jaspian, 366 suku bangsa. Van Vollenhoven, Skinner ??
- [12] 1908 adalah tahun berdirinya Boedi Oetomo, organisasi pemuda yang dianggap memiliki andil besar terhadap terbukanya akses dan semangat pergerakan berskala nasional lintas etnik di India-Belanda yang kemudian menjadi negara Republik Indonesia.
- [13] Gonggong, Anhar. (2002). *Indonesia, Demokrasi, dan Masa Depan*. Jogjakarta: Komunitas Ombak; Hasanuddin. 2018. *Wacana Etnik dalam Multikulturalisme Indonesia: Dinamika Adaptif Diaspora Minangkabau di Bali*. Padang: Penerbit Erka; Ardika, I Wayan. 2004. “Bukti-Bukti Arkeologi Terbentuknya Akar Multikulturalisme” Dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra (Ed.) *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*, Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi

Press;

- [14] The Script of The 1945 Basic Constitution of The Republic of Indonesia; The Constitution of The Republic of Indonesia Number 22/1999 Regarding the Regional Government; The Constitution of The Republic of Indonesia Number 32/2004 Regarding the Regional Government; The Constitution of The Republic of Indonesia Number 23/2014 Regarding the Regional Government



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email : [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

---

Nomor : B-1346 /UN40.LP/TU/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Menjadi Nara sumber

Yth. **Bapak Dr. Hasanuddin, M.Si.**  
Ketua Prodi Kajian Budaya, FIB, Universitas Andalas di  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan *International Webinar* dengan tema “**Strategi Kolaborasi Pengembangan Jejaring Industri Ekowisata Berbasis Budaya dan Pendidikan Seni**”, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Industri Pariwisata LPPM Universitas Pendidikan Indonesia, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi nara sumber pada kegiatan tersebut. Adapun penyelenggaraan kegiatan webinar ini melalui Aplikasi *Zoom Meeting* yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 7 Oktober 2021  
Waktu : Pukul 08.00 s.d selesai  
Media : Aplikasi *Zoom Meeting*  
Meeting ID : 841 6215 7748  
Passcode : 697514

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 22 September 2021

Ketua,



Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.

NIP 196310241988031003

Tembusan :  
Sekretaris LPPM.

## SUSUNAN ACARA

WAKTU	KEGIATAN	DURASI	PENGISI ACARA
07.30 – 08.00	Registrasi dan Penayangan Display Seluruh Pengisi Acara	30 menit	Operator
08.00 – 08.10	Pembukaan	10 menit	MC : Gisel Tanjung Oktarina, M.Pd.
08.10 – 08.15	Indonesia Raya	5 menit	Operator, MC
08.15 – 08.20	Pembacaan Do'a	5 menit	Dr. Syaifullah Syam, M.Si.
08.20 – 08.25	Sambutan Kapus EKKIP	5 menit	Dr. Yuliawan Kasmahidayat, M.Si.
08.25 – 08.35	Sambutan sekaligus Pembukaan	10 menit	Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.
08.35 – 08.45	Opening Art	10 menit	HIMASTAR, MC, Operator
08.45 – 08.50	Pembacaan CV Moderator	5 menit	MC : Gisel Tanjung Oktarina, M.Pd.
08.50 – 08.55	Pembacaan CV Keynote Speaker	5 menit	Moderator : Dr. Rita Milyartini, M.Si.
08.55 – 09.40	Pemaparan Materi Keynote Speaker	45 menit	Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
09.40 – 11.00	Pematerian Narasumber	90 menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Yuliawan Kasmahidayat, M.Si. (Dosen Pendidikan Seni Tari FPSD dan Kepala Pusat Kajian EKKIP LPPM UPI)</li> <li>2. Assoc. Prof. Dr. Mohd Hafiz Mohd Hanafiah, CHIA (Timbalan Dekan – Penyelidikan dan Jaringan Industri, Universiti Teknologi MARA)</li> <li>3. Dr. Hasanuddin, M.Si. (Ketua Prodi Kajian Budaya, FIB, Universitas Andalas)</li> </ol>
11.00 – 11.45	Tanya Jawab	45 menit	Moderator, Narasumber, dan Peserta
11.45 – 11.50	Foto Penutupan	5 menit	
11.50 – 12.00	Penutupan		MC

## LEMBAR KESEDIAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Instansi :

Menyatakan (Bersedia/Tidak Bersedia) menjadi Narasumber pada Kegiatan Webinar dengan tema “Strategi Kolaborasi Pengembangan Jejaring Industri Ekowisata Berbasis Budaya dan Pendidikan Seni” yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 7 Oktober 2021, pukul 07.30 – 12.00 WIB dan diselenggarakan secara virtual oleh LPPM UPI.

Demikian surat ini, untuk digunakan sebagaimana seharusnya

Hormat Kami

-----

Catatan : Lembar kesediaan ini mohon dikirimkan kembali ke Whatsapp 088222034631 / herumahmud@upi.edu dengan menyertakan dokumen berikut (untuk kelengkapan administrasi)

1. Curriculum Vitae
2. KTP/Identitas
3. NPWP (Nomor Wajib Pajak)
4. Nomor Rekening Bank
5. Materi Khusus Narasumber (Fullpaper dan Slide Presentasi)

Mohon dikirimkan paling lambat tanggal 2 Oktober 2021.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Alamat : Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang - 25163

Telepon : (0751) 71227 Fax : (0751) 71227

Laman : <http://fib.unand.ac.id>, email: [dean@hum.unand.ac.id](mailto:dean@hum.unand.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B/693 /UN.16.7/HM.01.01/2021

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas menugaskan Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

No	Nama	NIP	Pangkat / Gol.	Ket.
1.	Dr. Hasanuddin, M. Si	196803171993031002	Pembina Tingkat I / IVb	Dosen Sastra Minangkabau

Sebagai Narasumber dalam kegiatan International Webinar dengan tema “Strategi Kolaborasi Pengembangan Jejaring Industri Ekowisata Berbasis Budaya dan Pendidikan Seni” diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia melalui Zoom pada tanggal 7 Oktober 2021, dengan ketentuan :

1. tidak mengganggu tugas wajib di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
2. setelah selesai melaksanakan kegiatan, membuat laporan ke Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
3. segala biaya yang ditimbulkan pada kegiatan ini tidak dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Padang

Pada tanggal : 22 September 2021

Dekan,

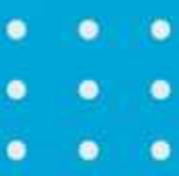


Prof. Dr. Herwandi, M. Hum

NIP. 196209131989011001

# COLLABORATIVE STRATEGY FOR DEVELOPING ECOTOURISM INDUSTRY NETWORKS BASED ON CULTURE AND ARTS EDUCATION

## KEYNOTE SPEAKER :



## INTERNATIONAL WEBINAR SERIES 1

In Collaboration between  
Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Andalas,  
and Universiti Teknologi MARA

**7th October 2021**  
**08.00 - 11.30 WIB**

**Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd**  
**Indonesian Ambassador of Uzbekistan and Kazakstan**  
"Strengthening the Creative Economy, Entrepreneurship, and Tourism Industry  
in the Era of the Pandemic in Uzbekistan"

## OPENING SPEECH :

**Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum**  
Head of LPPM UPI



## SPEAKER :



**Dr. Yuliawan Kasmahidayat, M.Si**  
Lecturer in Dance Education Program, FPSD, UPI  
Head of EKKIP LPPM UPI  
"Cultural Variety of the Archipelago  
in Anthropological Studies of Art Education"



**Dr. Hasanuddin, M.Si.**  
Lecturer in Cultural Studies Program,  
FIB, Andalas University  
"Synergy of Ecotourism Industry Development  
Based on Indonesian Cultural Pluralism"



**Assoc. Prof.**  
**Dr. Mohd Hafiz Mohd Hanafiah**  
Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Jaringan Industri)  
Universiti Teknologi MARA  
"Blue Tourism :  
Asimilating Blue Economy Concept  
with Sustainable Marine  
and Coastal Ecotourism Development"

## MODERATOR



Dr. Rita Milyartini, M.Si.

## MC



Gisel Tanjung Oktarina, M.Pd.

>> [bit.ly/WEBINARWCUSERIES1](https://bit.ly/WEBINARWCUSERIES1) <<

**FREE : E-SERTIFICATE & MATERIAL**